



Presiden Joko Widodo dari Istana Negara menyapa Gubernur Akhil dan staf serta Perwira Remaja TNI AD lewat 'video conference'.

KR-M Thoha

254 Perwira Remaja Ikuti Praspa

MAGELANG (KR) - Para Perwira Remaja TNI AD Tahun 2020 diharapkan menjadi perwira tangguh dan militan dan dapat diandalkan sebagai penjuror-penjuror terdepan di satuan-satuan di mana pun mereka bertugas. Ilmu yang diperoleh dapat dijadikan sebagai modal dalam mengembangkan kepemimpinan mereka.

Harapan tersebut disampaikan Pangkostrad Letnan Jenderal TNI Besar Harto Karyawan SH MTr (Han), mewakili KSAD saat bertemu 254 Perwira Remaja TNI AD Tahun 2020 di lapangan Sapta Marga Akhil Magelang, Selasa (14/7). Pertemuan itu dilakukan, se usai mengikuti upacara Prasetya Perwira (Praspa) TNI dan Polri yang dipimpin Presiden Joko Widodo dari Istana Negara Jakarta.

Upacara pelantikan dan pengambilan sumpah dilaksanakan secara video conference. Kalau sebelumnya mereka merupakan Calon Perwira Remaja (Capaja), setelah dilantik menjadi Perwira Remaja (Paja) dengan Pangkat Letnan Dua (Letda).

Didampingi Gubernur Akhil Mayjen TNI Dudung Abdurachman, Pangkostrad mengatakan, para Perwira Remaja TNI

AD Tahun 2020 ini sebelumnya dididik di lembah Tidar Kota Magelang selama 4 tahun dan menjadi modal dasar yang nantinya diterapkan dan dikembangkan dalam kepemimpinannya setelah menjadi seorang perwira muda.

Gubernur Akhil Mayjen TNI Dudung Abdurachman berpesan, hidup bukanlah pertandingan, tetapi merupakan perjalanan. Dalam setiap perjalanan itu, para perwira muda ini diminta jangan pernah menyerah.

Di antaranya Perwira Remaja TNI AD Tahun 2020 terdapat satu Perwira Remaja yang pernah menyanggah gelar sebagai Putri Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur dan Putri Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013. Ia adalah Letda Rizky Aulia, yang merupakan putri kedua dari keluarga pasangan Iqbal Syachwani-Chorida.

Presiden Joko Widodo memberikan pesan agar para Perwira Remaja TNI-Polri harus berpartisipasi dan belajar menyelesaikan krisis saat pandemi Covid-19 serta memperkokoh kebersamaan berlandaskan Pancasila untuk meraih lompatan kemajuan. (Tha/Sim)-d

PENAMBAHAN SARPRAS SELESAI 2022

Talut TPST Piyungan Ditingkatkan

YOGYA (KR) - Pemda DIY akan meningkatkan kapasitas talut serta membangun sarana dan prasarana (Sarpras) drainase, pipa lindi dan jalan operasional di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan, yang ditargetkan selesai pada 2022 mendatang.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral (PUPESDM) DIY Hananto Hadi Purnomo mengatakan, pembangunan sarpras tersebut untuk menambah kapasitas yang akan mengelilingi TPST Piyungan dan dinaikkan tinggi talutnya.

"Kami harapkan jumlah sampah yang ditampung akan lebih banyak dengan pembangunan sarpras tersebut. Kita juga harus

memperbaiki drainase, pipa lindi, jalan akses dan sebagainya supaya tidak mencemari masyarakat di sekitarnya," kata Hananto di Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (14/7).

Hananto mengatakan, peningkatan kapasitas dan pembangunan sarpras di TPST Piyungan tersebut baru dilelangkan dan kontrak baru Juli 2020 ini. Dalam rangka peningkatan kapasitas dan pengelolaan TPST Piyungan

tersebut pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Zona A akan ditutup terlebih dahulu tahun ini.

"Operasional sampah harus ada sarpras berupa dermaga di TPST Piyungan, sebagai tempat kendaraan masuk menumpahkan sampah kemudian diratakan. Sarpras yang ada di dermaga tersebut baru sementara, tidak permanen, sesuai kebutuhan sehingga baru akan dibangun," terangnya.

Disampaikan, pihaknya akan menanganai Zona A terlebih dulu untuk proses penutupan, kemudian Zona B di TPST Piyungan dapat difungsikan untuk menampung sampah. Talut Zona A dan B

akan ditinggikan lagi karena untuk menutup atau menumpuk sampah harus ada tempat penampungan. Pihaknya menyediakan anggaran sekitar Rp 13 miliar dengan nilai kontrak Rp 10 miliar pada 2020 ini.

"Zona A akan ditutup, maka Zona B bisa dipakai untuk pembuangan sampah baru, sehingga perlu penambahan kapasitas dengan peninggian talut supaya tidak melebar ke luar TPST. Target peningkatan kapasitas dan pembangunan Sarpras ini selesai pada 2020 seiring rampungnya proses Kerja Sama Badan Usaha dan Pemerintah (KPBU)," ungkap Hananto.

Pemda DIY telah menyiapkan lahan seluas 1,9 hektare

tahun ini ditambah proses penyiapan lahan 4,1 hektare tahun depan, sehingga total 6 hektare untuk KPBU TPST Piyungan. Proses KPBU TPST Piyungan tersebut tengah memasuki kajian studi dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dengan tambahan lahan seluas 6 hektare tersebut, sampah di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Bantul (Kartamantul) bisa tertangani dengan baik.

"Kami akan meningkatkan kapasitas talut yang sudah ada maupun yang baru sepanjang 430 meter dengan tinggi 3-4 meter mengelilingi TPST Piyungan tahun ini. Sedangkan pembangunan sarprasnya ta-

hun ini di antaranya pipa lindi sepanjang 959,27 meter serta drainase dan jalan sekitar 580 meter," tutur Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPESDM DIY Arief Azazi Zein.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY Sutarto MP menyatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Dinas PUPESDM DIY terkait pembangunan TPST Piyungan. Penataan TPST Piyungan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas penampungan sampah, sehingga kemungkinan sampah masuk ke TPST Piyungan menjadi lebih besar dan umurnya bisa bertambah dua tahun.

(Ira/Ria)-f

TEMANGGUNG MENUJU ZONA HIJAU

9 Kecamatan di Pati Masih Zona Merah

TEMANGGUNG (KR) - Wakil Bupati Temanggung Heri Ibnu Wibowo mengingatkan masyarakat pentingnya mematuhi protokol kesehatan dan segala anjuran Pemerintah untuk memutus penyebaran virus Corona jenis baru, sehingga Kabupaten Temanggung bisa segera menjadi zona hijau dari pandemi Covid-19.

"Perkembangan positif terus terjadi, karena itu semua pihak perlu patuhi protokol kesehatan agar lekas menjadi zona hijau," kata Wabup Temanggung, Selasa (14/7).

Dikatakan, dalam beberapa hari tidak ada penambahan kasus positif Covid-19. Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan Orang Dalam Pemantauan (ODP) jumlahnya terus berkurang. "Hari Selasa tidak ada penambahan pasien Covid-19. Masih tetap satu yang dalam karantina mandiri. Satu PDP dan satu ODP dinyatakan lepas," katanya.

Jumlah korban meninggal dunia akibat Covid-19 di Kabupaten Pati bertambah lagi. Seorang laki-laki warga Desa Wedarijaksa meninggal dunia, sehingga dalam sepekan ini jumlah korban meninggal menjadi tiga orang, setelah sebelumnya dua warga Desa Pagerharjo meninggal dunia secara berurutan. "Untuk warga Pagerharjo memang ter-

papar Covid-19. Namun untuk warga Wedarijaksa belum ada konfirmasi, karena hasil swab belum keluar," kata Bupati Pati H Haryanto.

Bupati Pati mengingatkan kondisi adaptasi baru, yakni tatanan pemerintahan dan kehidupan sehari-hari memakai aturan. "Kalau bepergian pakai masker, jaga jarak dan tidak ngumpul-ngumpul agar tidak terkontaminasi. Dalam Perbup 49/2020, ditulis bahwa masyarakat bepergian tidak pakai masker dan tertangkap tim penertiban akan ada sanksinya," ujarnya.

Dikatakan, kemarin ada penambahan lima pasien positif Covid-19, sehingga jumlahnya menjadi 11 kasus. "Ini harus tertangani secara baik," tegasnya.

Akibat penyebaran Covid-19 di Pati yang mengganas, menjadikan sembilan kecamatan masih ditetapkan sebagai zona merah, yakni Kecamatan Cluwak, Dukuhseti, Tayu, Margoyoso, Trangkil, Wedarijaksa, Pati, Margorejo dan Kecamatan Sukolilo.

Bupati Cilacap Tatto Suwanto Pamuji menyatakan, pasien positif Covid-19 kembali bertambah satu orang menjadi 68 orang, namun 62 orang sudah sembuh, sehingga kini tinggal lima orang yang masih dirawat. (Osy/Cuk/Mak)-d

BERKEDOK BUKA LOWONGAN KERJA

Dua Perempuan Dijadikan PSK



KR-Wahyu Priyanti

Petugas Polsek Mlati menunjukkan barang bukti di depan tersangka AP.

jaan sebagai terapis pijat melalui grup info lowongan kerja. Setelah calon PSK didapatkan, tersangka kemudian mencari pelanggan dengan mengunggah foto-foto kedua wanita tersebut ke media sosial. Saat ada lelaki hidung belang yang berminat, tersangka melanjutkan percakapan melalui WhatsApp. AP mematok harga Rp

500.000 untuk sekali kencan *short time*, sedangkan untuk *long time*, memasang tarif Rp 800.000. Setelah tawar menawar harga dengan calon pelanggan *deal*, tersangka menghubungi kedua wanita yang dijadikan PSK tersebut agar menuju hotel yang telah dipesan AP.

"Awalnya kedua wanita itu tidak tahu akan dipekerjakan sebagai PSK. Setahu

mereka, menjadi terapis. Namun, karena terdesak kebutuhan ekonomi, mereka akhirnya mau melayani pelanggan beberapa kali sejak kurun waktu Juni hingga saat ini," papar Kapolsek mengutip hasil pemeriksaan dalam kasus tersebut.

Kanit Reskrim Iptu Dwi Noor menambahkan, untuk sekali kencan *short time*, tersangka meminta Rp 100.000, sedangkan *long time* Rp 200.000 kepada keduanya.

Selain mengambil keuntungan dari praktik prostitusi itu, tersangka juga membebaskan biaya sewa kamar hotel kepada korban. Tersangka ditangkap Minggu (5/7) pukul 17.00 di Jalan Magelang Sinduadi Mlati Sleman. Saat itu, AP dipancing lewat korban yang juga pekerja seksnya untuk mengambil uang. (Ayu)-d

HARI PERTAMA UJI COBA BERBAYAR

Tebing Breksi Kembali Dibuka

SLEMAN (KR) - Ratusan pengunjung mulai mendatangi Tebing Breksi di Prambanan, Sleman pada hari pertama uji coba berbayar, Selasa (14/7). Uji coba ini merupakan tindak lanjut dari simulasi yang telah di-

lakukan sebelumnya. Saat masa pandemi Covid-19, Tebing Breksi ditutup untuk kunjungan sejak 25 Maret. Kamarin, objek wisata ini kembali dibuka mulai pukul 08.00-20.00 dengan sejumlah hal baru yang turut dite-

rapkan.

Menurut Khoлиq Widiyanto, Ketua Pengelola Tebing Breksi, hal baru tersebut di antaranya pendataan pengunjung secara digital. "Kami gunakan aplikasi Visiting Jogja sesuai arahan

dari Dinas Pariwisata DIY," terang Khoлиq.

"Selain itu kami juga mengimbau para wisatawan agar membayar secara *cashless* meskipun kami tetap melayani pembayaran tunai," sambung Khoлиq.

Dan yang paling penting, semua petugas serta pelaku pariwisata di Tebing Breksi wajib menerapkan protokol kesehatan sesuai arahan Dinas Kesehatan. Mulai dari cuci tangan, pemeriksaan suhu tubuh, pemakaian sarung tangan hingga peneanan *face shield*.

Saat di lapangan maupun di titik kumpul, pengelola juga menempatkan petugas yang siap dengan *megaphone*-nya untuk selalu mengimbau wisatawan agar selalu memperhatikan protokol kesehatan. (Sal)-d



KR-Surya Adi Lesmana

Wisatawan di Tebing Breksi saat uji coba berbayar hari pertama.

MAHFUD BENTUK PEMBURU KORUPTOR

KPK Ingatkan, Dulu Tak Membawa Hasil

JAKARTA (KR) - Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan, tim pemburu koruptor segera dibentuk dengan menampung masukan-masukan dari masyarakat. Terkait hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan soal pembentukan tim pemburu koruptor yang sebelumnya tidak memberikan hasil optimal.

"Saya pikir pembentukan tim ini di tahun 2012 dan senyatanya tidak memberi hasil optimal, cukup untuk menjadi pembelajaran agar tidak diulangi lagi," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolongo dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (14/7).

Ia mengatakan demikian sebagai respons atas rencana pengaktifan kembali tim pemburu koruptor oleh pemerintah. Dalam hal ini sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan, tim pemburu koruptor segera dibentuk.

"Karena ini memang perlu kerja bareng, tidak boleh berebutan dan tak boleh saling sabot. Tetapi, berprestasi pada posisi tugas masing-masing lembaga atau aparat yang oleh undang-undang ditugaskan untuk melakukan itu," kata Mahfud, dalam video

yang dikutip dari akun instagramnya di Jakarta, Selasa (14/7).

Keputusan Menko Polhukam tentang pengaktifan kembali tim pemburu koruptor, pemburu aset, pemburu tersangka dan pemburu terpidana dalam tindak pidana yang melarikan diri atau yang bersembunyi atau yang disembunyikan sekarang terus berproses.

"Karena *cantelannya* itu adalah Inpres, maka sekarang Inpres tentang tim pemburu aset, pemburu tersangka dan terpidana koruptor serta tindak pidana lain itu, sudah ada di tangan Kemenko Polhukam, sehingga secepatnya segera dibentuk tim," katanya lagi.

Tim ini berisikan Kejaksaan Agung, Polri, Kemenkumham, Kemendagri dan departemen teknis lainnya. Mahfud juga menegaskan, tim pemburu koruptor tidak akan mengambil alih tugas KPK.

Terhadap masalah ini, Wakil Ketua KPK Nawawi mengatakan, lebih bijak jika meningkatkan semangat koordinasi dan supervisi antar-lembaga penegak hukum serta lembaga/badan lain yang terkait. (Ful)-f